

PENGUATAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BENTUK PERTAHANAN NEGARA: PENGALAMAN DARI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT

Yusa Djuyandi^{1*}, Luthfi Hamzah Husin², Mustabsyrotul Ummah Mustofa³, Muhammad Nurdi
Iriansyah⁴

^{1,2,3}Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

⁴Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran / Sekolah Staf dan Komando
Angkatan Udara

*Korespondensi : yusa.djuyandi@unpad.ac.id

ABSTRAK. Sebagai daerah terdepan yang berfungsi sebagai wilayah pertahanan dan penegakkan kedaulatan negara, wilayah perbatasan merupakan wajah pertama dari pertahanan bangsa dan negara. Kecamatan Entikong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia yang merupakan perbatasan wilayah Indonesia dengan wilayah Serawak Malaysia. Perbatasan ini memiliki peran yang cukup strategis sebagai pintu perbatasan jalur darat. Melihat posisi strategis Entikong, pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pertahanan penting untuk dilakukan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupaya memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat di wilayah perbatasan untuk lebih mengenal konsep pertahanan dan memiliki semangat cinta tanah air. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penjagaan kedaulatan perbatasan dengan pendekatan budaya, sosial dan ekonomi yang sangat erat dengan keseharian masyarakat. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan menyelenggarakan diskusi kelompok terarah dengan tokoh masyarakat, unsur pemerintah setempat dan perwakilan masyarakat, selain itu dilakukan juga proses sosialisasi kepada masyarakat. Alat peraga seperti poster dan buku saku juga turut disertakan sebagai materi sosialisasi. Dari hasil diskusi diketahui bahwa pemahaman akan pentingnya rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, sebab masyarakat di wilayah perbatasan baik yang ada di Indonesia maupun Malaysia masih memiliki hubungan kekerabatan yang kuat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Wilayah; Perbatasan Indonesia-Malaysia; Pertahanan Negara

ABSTRACT. As the outermost area that functions as an area of defense and enforcement of state sovereignty, the border area is the first face of the defense of the nation and state. Entikong District is a sub-district in Sanggau Regency, West Kalimantan, Indonesia, which is the border between Indonesia and Malaysia's Sarawak region. This border has a strategic role as a border gate for land routes. Considering Entikong's strategic position, community empowerment as a defense effort becomes important. Community service activities seek to provide a broader understanding to people in border areas to get to know the concept of national defense and have the spirit of patriotism. Thus, the community is expected to have an active role in maintaining border sovereignty with a cultural, social, and economic approach that is very closely related to people's daily lives. Service activities are carried out by holding focus group discussions with community leaders, local government elements and community representatives, in addition, socialization also carried out to the community. Props such as posters and pocketbooks were also included as socialization materials. From the results of the discussion, it is known that the understanding of the importance of a sense of nationalism amid the society while still considering the values of local wisdom, because people in border areas both in Indonesia and Malaysia still have strong kinship relations.

Keywords: Regional Empowerment; Indonesia-Malaysia Border; National Defense

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan negara merupakan daerah terdepan dari suatu wilayah negara yang mana memiliki fungsi pertahanan dan penegakan hukum pada suatu wilayah negara (Witkin, 2011). Karenanya, pengelolaan perbatasan di berbagai negara telah menjadi suatu identitas penting bagi eksistensi sebuah bangsa dan negara di mana setiap bangsa dan negara akan terus berupaya untuk mempertahankan setiap jengkal dari batas-batas wilayah yang mereka klaim, adanya upaya pencaplokan dan perselisihan mengenai batas-batas wilayah negara akan selalu dapat menyinggung rasa nasionalisme yang kemudian bisa berujung pada konflik. Dilihat dari sini, wilayah perbatasan menjadi sangat penting dalam kajian pertahanan negara, terutama dalam isu ancaman-ancaman terhadap kedaulatan suatu negara. Persoalan perbatasan, khususnya di antara Indonesia dan Malaysia, adalah masih terdapat beberapa *Outstanding Boundaries Problem* (OBP) yang hingga kini masih belum disepakati kedua belah pihak (CNN Indonesia, 2019). Di wilayah daratan di Pulau Kalimantan, contohnya, terdapat sembilan titik yang hingga tahun 2019 belum disepakati batas wilayahnya oleh kedua negara (Hariyanto, 2019).

Selanjutnya, wilayah perbatasan seringkali juga dipersepsikan sebagai etalase negara dan karenanya situasi dan kondisi yang ada di daerah perbatasan terkadang menjadi cerminan keadaan sebuah bangsa dan negara. Banyak negara sangat memperhatikan kondisi infrastruktur dan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan negara, hal ini menjadi penting karena upaya untuk membangun kekuatan negara di wilayah perbatasan tidak hanya dapat dilihat dari sejauhmana kemampuan militer atau pasukan penjaga perbatasan untuk mengawasi wilayah perbatasan negara. Dalam kondisi di mana masyarakat di wilayah perbatasan tidak sejahtera, pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat tidak banyak tersedia, maka potensi ancaman terhadap negara bisa datang kapanpun dari dalam masyarakat itu sendiri.

Persoalan ancaman pertahanan di wilayah perbatasan bukan hanya dapat dianalisis dari pengawasan atau kontrol para pasukan penjaga perbatasan, tetapi juga dapat dicermati

dari kondisi sosial serta ekonomi masyarakat sekitar atau sering disebut sebagai pendekatan lunak (Hagström & Pan, 2020; Rosyidin, 2014). Adanya kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat di wilayah perbatasan dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara berdasarkan sudut pandang dimensi keamanan non-tradisional. Masalah-masalah yang muncul dari adanya kemiskinan masyarakat dan keterbelakangan infrastruktur di daerah perbatasan telah mendorong sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kelemahan itu sebagai celah dalam rangka melakukan aktivitas perdagangan atau aktivitas ekonomi yang bersifat illegal, seperti perdagangan senjata api, kendaraan bermotor, dan hasil bumi dengan bantuan dari masyarakat sekitar. Masalah lainnya adalah munculnya ancaman terhadap semangat nasionalisme masyarakat di sekitar wilayah perbatasan sebagai akibat kurangnya perhatian pemerintah atas keadaan hidup mereka. Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang jauh lebih baik bukan hanya membuat warga lokal di sekitar perbatasan lebih memilih beraktivitas di Malaysia, tetapi juga turut serta mengurangi rasa nasionalisme mereka (Kuntjorowati & Prastyowati, 2017; Mansyah, 2017; Siregar et al., 2019).

Pada situasi di atas, pertahanan negara di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia juga ditentukan oleh aspek pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, terbelakangnya daerah perbatasan dan bergantungnya kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar pada aktivitas ekonomi negara tetangga menjadi suatu permasalahan yang bisa berdampak pada menurunnya rasa nasionalisme. Apabila kondisi itu didiamkan, dengan situasi dimana rasa nasionalisme warga lokal terus dibiarkan berkurang, maka bisa berdampak pada lepasnya wilayah yang masih dalam status quo. Sebagaimana juga pernah dikemukakan oleh Westmoreland (2015) bahwa nasionalisme adalah sesuatu yang dibentuk dan bersifat fluktuatif, karena rasa nasionalisme bersifat fluktuatif maka hal ini bisa berpengaruh pada perubahan lokasi wilayah batas negara. Bagi sekelompok warga yang berada di daerah perbatasan dengan kondisi yang tidak begitu mendapat perhatian penuh pemerintah namun

justeru mereka merasakan adanya satu keuntungan dari kehidupan perekonomian di negara tetangga, maka bukan tidak mungkin posisi status quo akan bergeser dan memihak pada negara Malaysia.

Berangkat dari kasus masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas dasar kajian tersebut penting untuk dilakukan. Sebagai salah satu wilayah perbatasan yang sangat strategis, Kecamatan Entikong berbatasan langsung dengan wilayah Serawak di Malaysia, akses ke wilayah ini tanpa harus melalui jalur sungai atau laut. Akses yang mudah melalui jalan darat ini menempatkan Entikong sebagai sebuah wilayah yang memiliki peran penting dalam hal ekonomi bagi kedua negara. Terdapat salah satu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi wajah utama negara di perbatasan di mana terdapat beberapa hal strategis yang diurus di sana, seperti ekspor - impor, bea cukai, imigrasi, ketenagakerjaan, dan sebagainya.

Meski menjadi daerah lintas batas negara yang strategis, namun pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Entikong masih cukup bergantung pada alur barang dan jasa dari negara tetangga, khususnya wilayah Tebedu di Serawak, Malaysia. Sebagaimana misalnya untuk pemenuha kebutuhan pokok, masyarakat cenderung untuk membeli gula, minyak, gas, dan beras dari Malaysia, karena harganya yang relative lebih murah dan kualitas. Belum lagi untuk barang-barang dagang lainnya yang sering diperjual belikan, seperti coklat, minuman ringan, roti, dan lain sebagainya yang pasokannya lebih banyak berasal dari Malaysia daripada dari Indonesia sendiri. Kencenderungan masyarakat Entikong yang lebih memilih untuk menggunakan produk Malaysia daripada produk Indonesia dapat menjadi suatu kekhawatiran, sebab dengan pembelian produk Malaysia maka masyarakat juga lebih sering menggunakan mata uang Ringgit Malaysia daripada Rupiah. Hal ini secara tidak langsung dan secara perlahan dapat membuat masyarakat di perbatasan merasa lebih "Malaysia" daripada merasa sebagai orang Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan, tulisan ini memuat bagaimana pemberdayaan wilayah perbatasan dapat dilihat

sebagai usaha untuk memperkuat pertahanan negara. Penulisan dimulai dengan menceritakan metode yang digunakan di dalam menganalisis aktivitas pemberdayaan masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong. Kemudian, tulisan ini menjelaskan tentang temuan-temuan yang didapati selama aktivitas pemberdayaan, serta diskusi mengenai pembelajaran yang bisa diambil dari aktivitas tersebut, terutama relevansinya dengan kajian masalah yang telah dilakukan sebelumnya.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan riset aksi (*action research*) dengan memosisikan masyarakat sebagai subjek di dalam kegiatan yang dirancang. Goldstein dkk (2016) berargumen bahwa riset aksi melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam sebuah proses penelitian berbasis data yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Proses riset aksi dilakukan dengan cara membangun konsensus atas suatu permasalahan dengan cara mempertemukan antar subjektif dari narasumber (inter-subjektifitas) dalam mendefinisikan masalah. Kemudian, setelah permasalahan dapat teridentifikasi maka bersama-sama menganalisis sumber permasalahan dan hal-hal yang terakait dengan permasalahan tersebut. Setelah itu dilakukan perumusan suatu aksi hingga akhirnya pelaksanaan dan evaluasi terhadap aksi tersebut. Sebagai kegiatan operasionalnya, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan bentuk *focus group discussion* (FGD) dan pemberian materi atau pendidikan kepada tokoh masyarakat, aparatur kecamatan dan desa, dan masyarakat umum di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. Pelaksanaan FGD dilakukan dengan disertai aktivitas konsultasi yang bersifat interaktif antara pihak kecamatan, desa dan para tokoh masyarakat dengan pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat. Adapun materi yang dibahas antara lain mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat dan upaya menjaga pertahanan di wilayah perbatasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Sementara dalam hal penulisan artikel ini, kami menganalisis hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut dengan melakukan

observasi secara langsung terhadap serangkaian diskusi yang dilakukan. Temuan-temuan yang berkenaan dengan masalah yang dibahas sebelumnya digaribawahi dan kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mengomparasi melalui data sekunder. Hasil dari analisis tersebut kemudian dijadikan pembelajaran (*lesson learned*) yang diharapkan dapat dijadikan acuan dan pengembangan bagi kegiatan serupa di kemudian hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan riset aksi sebagai kerangka berpikir, rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan yang sudah dilakukan dalam proses penelitian turut membantu dalam tahapan kegiatan untuk pengabdian kepada masyarakat. Berikut merupakan beberapa proses yang sudah dilakukan:

1. Penelusuran data sekunder dari berbagai dokumen pendukung lain sebagai langkah awal aktivitas pengumpulan data yang menjadi bahan untuk penyampaian materi;
2. Penyusunan materi pelatihan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Pelaksanaan FGD dengan stakeholder terkait pertahanan di perbatasan Indonesia-Malaysia yang juga menjadi basis data untuk menyiapkan materi pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan kegiatan pertama dan kedua berupa pengumpulan data dan penyusunan materi dilakukan secara daring dengan mengumpulkan data-data terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan, khususnya di Kecamatan Entikong dan umumnya di Pulau Kalimantan dari kajian dan liputan yang dilakukan sebelumnya. Sementara untuk kegiatan tahap ketiga dalam pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan skema tatap muka secara langsung atau luring dengan para tokoh masyarakat adat Dayak dan Melayu di Kecamatan Entikong dan aparat setempat. Meskipun demikian, Kami tetap akan memperhatikan protokol kesehatan untuk

penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tahap ke-1 : Penelusuran Data Sekunder dan Dokumen Pendukung

Dimensi pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh hadirnya kekuatan militer dalam menjaga wilayah yang disengketakan tetapi juga ditentukan oleh adanya kekuatan non militer dengan pendekatan yang bersifat lunak. Konsep pertahanan dengan pendekatan lunak memperhatikan bagaimana kekuatan negara yang tidak hanya dilihat pada kemampuan militernya, tetapi juga pada kekuatan budaya, sistem politik, keterbukaan informasi bagi masyarakat, pendidikan, ideologi, model ekonomi, dan daya saing ekonomi (Wang & Lu, 2008). Kemampuan negara dalam bertahan amat diperlukan untuk dapat memenangkan “peperangan”, pertahanan negara menurut (Nye, 2008) sangat ditentukan oleh strategi *smart power* yang menggabungkan antara sumber-sumber *hard power* dan *soft power*, yang menarik dari konsep ini adalah bahwa *soft power* yang dilakukan melalui diplomasi publik juga membutuhkan adanya masyarakat sipil sebagai sebuah kekuatan (Nye, 2008).

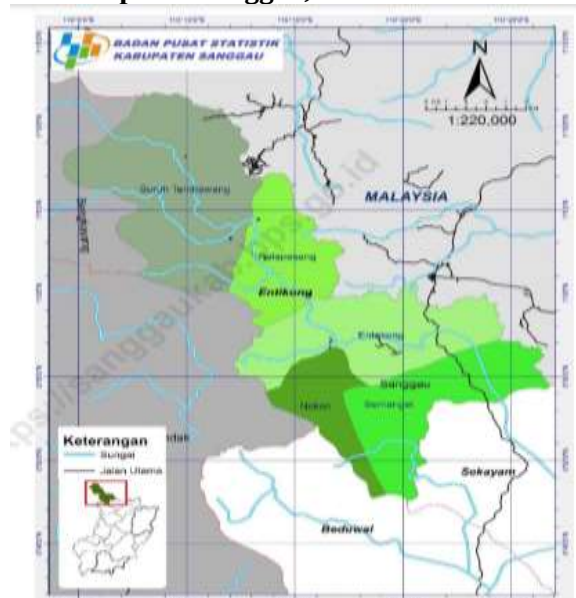
Menelisik pada konsep pertahanan itu sendiri, terutama bila merujuk pada pandangan perspektif lampau, maka pertahanan atau yang juga disebut sebagai *self-defence* adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer sebagai upaya untuk melindungi negara dari penderitaan yang disebabkan oleh serangan militer, konsep pertahanan ini berkenaan dengan *Caroline doctrine of anticipatory self-defence* (Reisman & Armstrong, 2006). Akan tetapi pasca perang dunia kedua, dimana kemudian terjadi sebuah revolusi dalam peperangan, maka pertahanan negara sebagai upaya menangkal serangan dan ancaman yang datangnya dari luar (*external threat*) tidak lagi hanya dapat dilihat dari ancaman militer, sebagaimana kemudian ancaman ekonomi dari luar negara juga menjadi sesuatu yang patut diperhitungkan, seperti halnya embargo (Schiff, 2009). Meskipun terdapat dua paradigma yang berbeda tentang pertahanan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, namun pada dasarnya pertahanan tetap dipersepsikan sebagai suatu daya tangkal untuk menahan adanya

serangan eksternal, dan tujuan dari pertahanan itu sendiri adalah untuk melindungi negara serta memberi masyarakat jaminan kebebasan dari rasa takut (Djuyandi et al., 2018; La Ode, 2006).

Pertahanan sebagai suatu usaha untuk melindungi negara dari adanya ancaman yang berasal dari eksternal tidak hanya dapat diimplementasikan dengan membangun atau memperkuat kekuatan militer, di sisi lain kekuatan non-militer juga perlu dibangun yang diantaranya adalah dengan melibatkan masyarakat sipil maupun pemerintah daerah. Sisi menarik dari teori ini adalah bahwa kemampuan kelompok non-militer dalam pertahanan negara diantaranya juga dapat dilakukan dengan mendorong kemampuan masyarakat sipil di sector diplomasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, dan moral (Bunga & Tukan, 2019). Apa yang kemudian dituangkan dalam teori tersebut menunjukkan bahwa konsep pertahanan negara telah mengalami suatu perubahan yang cukup signifikan, tidak lagi hanya melihat ancaman dan kekuatan militer sebagai satu-satunya yang hadir dalam dimensi pertahanan, tetapi juga melihat adanya dimensi lain di luar ancaman dan kekuatan militer.

Dari hasil penelaahan data sekunder mengenai Kecamatan Entikong, didapati beberapa potensi isu perbatasan jika dikaitkan dengan demografinya. Di antara persoalan yang sering dibahas adalah Kecamatan Entikong dari segi geopolitikanya. Lokasinya yang bertepatan di garis batas negara antara Indonesia dengan Malaysia membuat aparat setempat memiliki juga fungsi-fungsi diplomasi kewilayahan yang juga sangat erat kaitannya dengan isu pertahanan dan juga keamanan negara. Karenanya, aparat setempat juga sering terlibat di dalam kerjasama internasional yang berurusan dengan isu pertahanan dan keamanan dari masing-masing negara. Kemudian, karena posisinya yang dijadikan lalu lintas antar negara, masyarakat setempat juga memiliki *exposure* yang sangat kuat dengan pergaulan internasional utamanya dalam konteks perekonomian dan sosial budaya.

Gambar 1. Peta Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat



Sumber: Dicitak ulang dari BPS Kab. Sanggau, 2018.

Sebagaimana terlihat di dalam Gambar 1, Kecamatan Entikong memiliki luas wilayah 506,89 Km² atau sekitar 3,94 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau. Kecamatan Entikong terletak sejauh 145 Km dari Ibukota Kabupaten dan dapat ditempuh melalui transportasi darat. Kecamatan Entikong terdiri dari lima desa, di mana Desa Suruh Tembawang merupakan desa terluas dengan mencapai hampir dari 30% dari total luas seluruh kecamatan tersebut (BPS Kab. Sanggau, 2018).

Selanjutnya, isu yang teridentifikasi adalah isu keamanan non-tradisional yang mengancam masyarakat di sekitar perbatasan. Bentuk ancaman tersebut kebanyakan berupa peredaran obat terlarang lintas negara, *human trafficking* yang melibatkan lembaga penyalur tenaga kerja ilegal, dan juga peredaran barang ilegal. Isu ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dari masyarakat di Kecamatan Entikong yang masih sangat bergantung pada penyediaan barang dan jasa di Malaysia. Ketimpangan ekonomi yang terjadi membuat adanya ancaman non-tradisional tersebut dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada di masyarakat perbatasan. Sebagaimana dicatat dari BPS Kab. Sanggau (2018), penduduk Kecamatan Entikong berjumlah 18.166 jiwa, dengan rincian penduduk

laki-laki 9.542 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 8.624 jiwa. Dengan jumlah penduduk seperti itu, beberapa infrastruktur penting seperti pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas di Kecamatan Entikong. Tercatat hanya ada dua Sekolah Menengah Atas dan sebuah Puskesmas untuk melayani keseluruhan penduduk (BPS Kab. Sanggau, 2018).

Isu selanjutnya yang kemudian mencuat adalah persoalan sosial budaya. Kuatnya hubungan kekerabatan antara masyarakat Indonesia di Kecamatan Entikong dengan masyarakat Malaysia di Tebedu, Serawak, sudah terjalin sebelum negara modern berdiri. Hal ini membutuhkan pendekatan khusus yang melampaui sekedar persoalan administrasi dan legal formal antar negara. Kegiatan adat yang biasa dilakukan setiap tahunnya antar masyarakat adat Melayu atau Dayak di antara kedua negara

Tahap ke- 2: Penyusunan Materi Pengabdian

Materi yang disampaikan pada proses pengabdian kepada masyarakat meliputi tema nasionalisme dengan judul “Aku Bangsa Ber-Indonesia”. Tiga materi utama yang disampaikan adalah terkait apa itu Nasionalisme, mengapa masyarakat perlu memiliki semangat nasionalisme, bagaimana menunjukkan sikap nasionalisme secara sederhana, dan semangat cinta tanah air dengan upaya menjaga kekayaan alam dan budaya Indonesia.

A. Materi Nasionalisme

Nasionalisme merupakan sebuah perasaan dalam wujud rasa persamaan sekelompok manusia, yang memunculkan kesadaran sebagai bangsa. Persamaan itu bisa hadir dari pengalaman sejarah sehingga melahirkan persatuan dan cita-cita bersama yang ingin diterapkan pada negara yang berbentuk negara nasional. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Westmoreland (2015) bahwa nasionalisme adalah sesuatu yang dibentuk dan bersifat fluktuatif, karena rasa nasionalisme bersifat fluktuatif maka hal ini bisa berpengaruh pada perubahan lokasi wilayah batas negara. Bagi sekelompok warga yang berada di daerah perbatasan dengan kondisi yang tidak begitu mendapat perhatian penuh pemerintah namun justru mereka merasakan adanya satu keuntungan dari kehidupan perekonomian di

negara tetangga, maka bukan tidak mungkin posisi *status quo* akan bergeser.

Untuk itu, penguatan materi mengenai nasionalisme dirasa penting di dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan, sebagai pelengkap dari program pembangunan perbatasan yang masih banyak mengalami kendala hingga saat ini. Unsur materi nasionalisme terdiri dari perasaan nasional, watak nasional, batas nasional, peralatan nasional dan agama. Nasionalisme mencakup cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan kemauan untuk menjaga persatuan.

B. Materi Menjaga Indonesia dan Kekayaan di Dalamnya

Indonesia dianugerahi sebagai negara maritime dan negara tropis sekaligus dengan kekayaan alam dan budaya yang sangat melimpah. Indonesia merupakan pemilik 10% hutan tropis di dunia yakni terbesar ketiga di dunia dan rumah bagi 10% spesies tumbuhan, 17% spesies burung, 12% spesies mamalia dan 10% spesies amfibia dan reptile.

Selain kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki ragam budaya dan masyarakat adat yang majemuk. Setidaknya terdapat 1331 suku bangsa, 719 bahasa bangsa dan 200 produk hukum adat yang dimiliki Indonesia. Atas keragaman tersebut, Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bermakna persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama dan Bahasa.

Tahap ke-3: Pelaksanaan FGD dengan stakeholder terkait pertahanan di perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sosialisasi

Tahap ini dilakukan dengan beberapa tahap. FGD pertama dilakukan dengan cara mengundang beberapa perwakilan tokoh masyarakat adat di Kecamatan Entikong, yaitu masyarakat Melayu dan masyarakat Dayak. Kegiatan ini pun turut mengundang aparat setempat seperti pengurus kecamatan dan kelurahan, juga pengurus PLBN Entikong. Secara umum, FGD tersebut mendiskusikan terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat khususnya berkaitan dengan persoalan perbatasan antara Indonesia-Malaysia.

Dari diskusi tersebut, kegiatan berhasil mengidentifikasi dan merumuskan secara bersama-sama masalah apa saja yang dirasakan masyarakat dan solusi yang dapat dilakukan oleh setiap aktor yang terlibat di perbatasan. Di antara permasalahan perbatasan yang menjadi fokus dari masyarakat adalah kuatnya ketergantungan ekonomi dari masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga sehingga menimbulkan beberapa penyimpangan dan kriminalitas seperti maraknya peredaran barang ilegal yang tidak melalui kepabeanan, tingginya modus *human trafficking* dengan memanfaatkan kemiskinan yang dialami korban untuk kemudian dipekerjakan secara ilegal di Malaysia, dan juga masuknya barang terlarang seperti narkoba yang memanfaatkan kurir dari masyarakat perbatasan yang membutuhkan upah.

Jika ditilik dari segi ideologis, proses tanya jawab perihal kebangsaan dan kenegaraan masyarakat di perbatasan Indonesia – Malaysia pada Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menunjukkan bahwa rasa nasionalisme masih kuat. Namun, cukup banyaknya ketergantungan masyarakat perbatasan di wilayah Indonesia terhadap aktivitas perekonomian di wilayah Tebedu (Malaysia) akan mempengaruhi pertahanan jika tidak diimbangi dengan penguatan masyarakat perbatasan, khususnya dari segi ekonomi dan juga infrastruktur. Kasus yang dikemukakan oleh dua tokoh adat (kepala suku Dayak dan Melayu) berkenaan dengan adanya beberapa keluarga di dekat perbatasan yang menganggap bahwa mereka adalah Warga Negara Malaysia menjadi temuan penting yang menunjukkan adanya permasalahan akan identitas kebangsaan. Kondisi ini terjadi karena beberapa keluarga tersebut berlokasi cukup jauh dari pusat kecamatan, namun tempat tinggal mereka dekat dengan akses ekonomi, informasi, dan kesehatan di Malaysia. Diskusi dengan para tokoh, Camat Entikong, dan Kepala Keamanan PLBN Entikong, memunculkan kesepahaman tentang perlunya para *stakeholders* di perbatasan merangkul masyarakat di perbatasan yang tinggalnya cukup jauh dari pusat kecamatan, tujuannya agar masyarakat tersebut tidak merasa ditinggalkan dan tidak meninggalkan identitas dirinya sebagai Warga Negara Indonesia.

Pengabdian dilakukan dengan proses diskusi dengan masyarakat setempat seperti para penjual makanan, petugas PLBN, serta masyarakat yang dekat dengan dua titik pos perbatasan, dengan memberikan buku saku dan poster yang ditempatkan pada Kantor Kecamatan Entikong dan lokasi-lokasi strategis di sekitar perbatasan. Dari hasil diskusi kami menilai bahwa sebenarnya pemahaman akan pentingnya rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat pasca diskusi dan sosialisasi sudah ada dan masih terbilang kuat. Masyarakat mendukung segala upaya untuk penegakan kedaulatan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, sebab masyarakat di wilayah perbatasan baik yang ada di Indonesia maupun Malaysia adalah keluarga.

Gambar 3. FGD dengan Tokoh Masyarakat Dayak dan Melayu di Kecamatan Entikong
Sumber: Dokumen pribadi penulis.



Gambar 3. Penyerahan Poster dan Buku Saku Sosialisasi “Aku Bangga Ber-Indonesia” kepada Plt. Camat Entikong



Sumber: Dokumen pribadi penulis.
Diskusi yang dilakukan dengan tokoh masyarakat dari dua kepala suku, Dayak dan Melayu, semakin mendorong adanya pemahaman tentang

pentingnya peran lembaga adat untuk menumbuhkan semangat ke-Indonesiaan, dengan tanpa harus melupakan atau bahkan meninggalkan hubungan kekeluargaan antar masyarakat sedarah dan sebudaya yang dipisahkan oleh batas formal negara. Proses menguatkan rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan memiliki tantangan tersendiri, forum pimpinan kecamatan memiliki peran untuk menumbuhkan semangat nasionalisme karena akan terkait dengan pertahanan negara dari aspek non-militer. Tetapi kecamatan juga tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi antar berbagai pihak yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, universitas, bahkan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendekatkan hati masyarakat dengan bangsa. Masyarakat di perbatasan adalah juga bagian dari bangsa yang harus dirangkul dan diperhatikan kondisinya. Akses untuk pemenuhan kebutuhan hidup, seperti kebutuhan pokok makanan, ekonomi, pendidikan dan Kesehatan perlu dipenuhi. Pandangan bahwa Kawasan perbatasan adalah etalase sebuah negara, namun bila ditarik pada kondisi yang terjadi di Entikong dapat menunjukkan citra yang tidak baik pada pengelolaan kawasan perbatasan negara. Meski pemerintah telah mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, tetapi sejauh ini masih terfokus pada pembangunan PLBN sebagai perlintasan batas negara secara formal.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini memiliki kontribusi bagi peningkatan persepsi dan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan uraian pembahasan mengenai sosialisasi nasionalisme kepada Camat dan Tokoh Masyarakat, diketahui bahwasannya persoalan nasionalisme berkaitan erat dengan kehidupan di perbatasan yang multidimensi, yakni berkaitan dengan interaksi antar budaya yang berbeda, proses interaksi aktivitas ekonomi yang sangat intens, kondisi geografis wilayah perbatasan yang masih berupa hutan tropis dan kondisi penjagaan perbatasan. Beberapa masyarakat memiliki kecenderungan untuk menjalani kehidupan terutama berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sosial

sebagaimana kesehariannya tanpa menyadari bahwa hidup dan berinteraksi di antara dua aturan kenegaraan yang berbeda sehingga pengenalan terhadap wawasan kebangsaan menjadi berkurang karena tradisi lokal yang biasa dilakukan tidak berkaitan dengan batas administratif kenegaraan. Materi yang diberikan pada saat diskusi dan yang disampaikan dalam buku saku juga poster merupakan materi yang menambah wawasan masyarakat untuk peningkatan rasa cinta terhadap tanah air.

Kegiatan ini, respon masyarakat, para tokoh masyarakat, dan juga pihak kecamatan serta desa menunjukkan adanya suatu kesadaran tentang pentingnya menjaga kekuatan masyarakat sebagai aspek dari pertahanan nir-militer. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara yang tidak hanya bisa dilihat dari sisi kekuatan militer, namun juga perlu dilihat dari sisi kekuatan sosial dan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Universitas Padjadjaran yang telah memberikan bantuan pendanaan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk Tahun Akademik 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kab. Sanggau. (2018). *Kecamatan Entikong dalam Angka*. BPS Kab. Sanggau.
- Bunga, G. A., & Tukan, E. N. B. (2019). Legal Impact of State Defense on Indonesian Citizen in International Humanitarian Law Prespective. *Yustisia*, 8(2), 164–185.
- CNN Indonesia. (2019). *RI-Malaysia Akan Sepakati Perbatasan Negara di Dua Titik*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191116133148-106-448912-ri-malaysia-akan-sepakati-perbatasan-negara-di-dua-titik>
- Djuyandi, Y., Putra, K., & Faozan, H. (2018). Political Communication Between the House of Representatives and the Ministry of Defense in Discussing the Republic of Indonesia State Defense

- Policy. *Central European Journal of International & Security Studies*, 12(4), 82–95.
- Goldstein, B., Ick, M., Ratang, W., Hutajulu, H., & Blesia, J. (2016). Using the action research process to design entrepreneurship education at Cenderawasih University. 2nd International Conference on Higher Education Advances, HEAd'16, 21-23 June 2016, València, Spain, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 228, pp. 462 – 469.
- Hagström, L., & Pan, C. (2020). Traversing the soft/hard power binary: The case of the Sino-Japanese territorial dispute. *Review of International Studies*, 46(1), 37–55. <https://doi.org/10.1017/S0260210519000251>
- Hariyanto, I. (2019, November 16). *RI-Malaysia Akan Teken MoU 2 Daerah di Kalimantan Jadi Batas Negara*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4786930/ri-malaysia-akan-teken-mou-2-daerah-di-kalimantan-jadi-batas-negara>
- Kuntjorowati, E., & Prastyowati, S. (2017). Upaya Masyarakat Perbatasan Antarnegara dalam Mempertahankan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal PKS*, 16(4), 345–358.
- La Ode, M. D. (2006). *Peran Militer dalam Ketahanan Nasional; Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia Tahun 1967 – 2000*. Pustaka Sinar Harapan.
- Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Reisman, W. M., & Armstrong, A. (2006). The Past and Future of the Claim of Preemptive Self-Defense. *The American Journal of International Law*, 100(3), 525–550.
- Rosyidin, M. (2014). Soft Diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia : Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan
- Bintan Tahun 2010. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 3–22.
- Siregar, C. N. ; Rahmansyah, S. ;, & Saepudin, E. (2019). Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia : Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia). *Sosioglobal*, 4(1), 26–39.
- Schiff, R. L. (2009). *The Military and Domestic Politics: A Concordance Theory of Civil-Military Relations*. Routledge.
- Wang, H., & Lu, Y.-C. (2008). The Conception of Soft Power and its Policy Implications: a comparative study of China and Taiwan. *Journal of Contemporary China*, 17(56), 425–447. <https://doi.org/10.1080/10670560802000191>
- Westmoreland, J. B. (2015). *The Relationship Between National Identity and State Borders*. Appalachian State University.
- Witkin, N. (2011). The Interspersed Nation-State System: A Two-State/One-Land Solution for the Israeli-Palestinian Conflict. *Middle East Journal*, 65(1), 31–54. <https://www.jstor.org/stable/23012092>